

**LAPORAN KEUANGAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN**  
**31 DESEMBER 2018**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan, sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam usaha mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Jambi, Maret 2019

**Inspektur,**



**Dr. H. Kailani, S.H., M.Hum.**

NIP. 19601023 198903 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iv
Laporan Realisasi Anggaran .....	1
Neraca .....	2
Laporan Operasional .....	3
Laporan Perubahan Ekuitas .....	4
Catatan atas Laporan Keuangan .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	5
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	6
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	7
1.4. Profil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi .....	8
<b>BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR</b>	
<b>PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN .....</b>	<b>10</b>
2.1. Ekonomi Makro .....	10
2.2. Kebijakan Keuangan.....	10
2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan .....	11
<b>BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>14</b>
3.1. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar.....	14
3.2. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap .....	15
3.3. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya .....	15
3.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban .....	15
3.5. Kebijakan Akuntansi Belanja .....	16
3.6. Kebijakan Akuntansi Beban .....	16
<b>BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>17</b>
4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	17
4.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca .....	21
4.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional .....	25
4.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	27
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>28</b>

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Jambi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi,       Maret 2019

**Inspektur,**



**Dr. H. Kailani, S.H., M.Hum.**

NIP. 19601023 198903 1 002

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

#### **BAB I. Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- 1.4. Profil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

#### **BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

BAB III. Kebijakan Akuntansi

BAB IV. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

4.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

#### **1.4. Profil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas:

- a. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan,
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi,
- c. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, dan
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat berkomitmen dengan visi "Terwujudnya aparatur pengawasan yang profesional dan

berintegritas dalam rangka mengawal terwujudnya Jambi TUNTAS 2021” didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - 2. Sub Bagian Administrasi, Keuangan dan Umum;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- f. Jabatan Fungsional.

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi. Berangkat dari pemahaman seperti itu, maka secara makro kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi dapat dilacak dari perkembangan perekonomian daerah (pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi) yang ditunjang oleh perkembangan kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan sepanjang tahun 2017 dan pada tahun 2018.

Perkembangan perekonomian daerah yang yang dimaksud tentu tidak dengan sendirinya muncul ke permukaan sebagai sebuah keberhasilan yang tunggal. Perkembangan dimaksud didorong oleh perkembangan sektor-sektor pembangunan lainnya yang satu dan lain hal berawal dari pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian serta kondusifitas kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan daerah yang pada akhirnya nanti akan bermuara kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang secara kuantitatif akan ditunjukkan oleh perkembangan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Usia Harapan Hidup.

Dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian daerah yang semakin baik maka kebijakan perekonomian daerah tahun 2018 diarahkan pada upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar menuju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan tema RKPD Tahun 2018.

#### **2.2. Kebijakan Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inpektorat Daerah Provinsi Jambi, Rencana Kerja berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun dikaitkan dengan alokasi anggaran dalam APBD setiap tahunnya. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu OPD yang tidak memiliki pos penerimaan/pendapatan sedangkan dari sisi pengeluaran, Perda APBD yang telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan.

### 2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Pencapaian target keuangan dicapai melalui program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sudah baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	6.600.000	6.100.500	33,86
2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	219.600.000	187.858.470	79,59
3	Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.060.000	3.060.000	73,53
4	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	-	-	-
5	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	336.364.000	312.332.510	92,86
6	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	137.538.800	137.538.800	100,00
7	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.780.200	25.780.200	100,00
8	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	83.392.500	83.372.500	100,00
9	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	62.478.400	59.101.750	95,64
10	Kegiatan Komponen Instansi listrik/Penerangan bangunan kantor	16.864.500	16.864.500	100,00
11	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.524.000	13.524.000	100,00
12	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	38.500.000	22.043.800	57,26
13	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	145.000.000	107.269.000	73,98
14	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.260.211.500	1.253.628.730	99,48
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur</b>			
1	Kegiatan pengadaan kendaraan Dinas/operasional	25.000.000	21.300.700	85,20
2	Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	110.350.000	100.243.500	90,84

3	Kegiatan pengadaan mebeleur	85.000.000	47.220.000	55,23
4	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	291.900.000	291.880.000	99,99
5	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	67.500.000	55.979.000	82,93
6	Kegiatan Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	24.200.000	2.748.000	11,36
7	Kegiatan Pengadaan Komputer	186.500.000	179.255.000	96,12
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
1	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	66.000.000	64.790.000	98,17
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja keuangan</b>			
1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	34.674.000	33.150.000	95,60
	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>			
1	Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	2.035.864.000	2.016.325.091	99,04
2	Kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	161.776.000	138.692.600	85,73
3	Kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	1.792.200.000	1.778.703.777	99,25
4	Kegiatan inverisasi temuan pengawasan	48.105.000	35.845.000	74,51
5	Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan	934.513.900	921.370.429	98,59
6	Kegiatan gelar pengawasan dan rapat koordinasi daerah tahun 2018	621.963.000	453.666.400	72,94
7	Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	167.025.200	157.319.600	94,19
8	Kegiatan saber pungli	1.038.401.000	792.615.594	76,33
	<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>			
1	Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	468.662.000	440.931.392	94,08
2	Kegiatan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	119.834.000	34.234.000	28,57

	<b>Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>			
1	Kegiatan penyusunan kebijakan dan prosedur pengawasan	171.118.000	152.687.400	89,23
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.800.000.000</b>	<b>9.947.432.243</b>	<b>92,11</b>

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi yang bersumber dari Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015, memuat kebijakan spesifik untuk dipergunakan di Pemerintah Provinsi Jambi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dana dan basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### **3.1. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar**

Pos-pos Aset Lancar pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Kas dan Persediaan.

##### **a. Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

##### **b. Persediaan**

- Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan aset, persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai dan dikonsumsi.
- Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan.
- Persediaan dicatat dengan metode periodik. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode, dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.
- Pengukuran pemakaian persediaan berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal ditambah perolehan persediaan dikurangi saldo

akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

### **3.2. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

Pos-pos Aset Tetap pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Jaringan dan Instalasi, dan
- e. Aset Tetap Lainnya
  - Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, Aset-aset tersebut dicatat dalam buku ekstrakontabel.
  - Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
  - Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

### **3.3. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya**

Pos Aset Lainnya pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yaitu Aset lain-lain. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya

### **3.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Pos Kewajiban pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yaitu: Utang Belanja Jasa Kantor.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya.

### **3.5. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Pos-pos Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

### **3.6. Kebijakan Akuntansi Beban**

Pos-pos Beban pada Laporan Operasional Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban diukur berdasarkan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

**BAB IV**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran**

Selama periode berjalan, Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2018 sebesar Rp 20.477.175.101,00 ditambah sebesar Rp 1.263.509.036,00, sehingga pagu anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menjadi sebesar Rp 21.740.684.137,00.

Rincian Pagu Pendapatan dan Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Pagu	
	Awal (Rp)	Revisi (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>		
Total Pendapatan	0,00	0,00
<b>BELANJA</b>		
Belanja Pegawai	9.677.175.101,00	10.940.684.137,00
Belanja Barang dan Jasa	10.800.000.000,00	10.371.198.000,00
Belanja Modal	367.100.000,00	428.802.000,00
<b>Total Belanja</b>	<b>20.477.175.101,00</b>	<b>21.740.684.137,00</b>

sedangkan apabila dilihat dari program, maka pagu belanja adalah sebagai berikut:

Uraian Program	Jumlah Pagu	
	Awal (Rp)	Revisi (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.994.998.400,00	2.348.913.900,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	686.996.000,00	790.950.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	66.000.000,00	66.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	70.186.500,00	34.674.000,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	6.916.727.600,00	6.799.848.100,00
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	573.696.000,00	588.496.000,00
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur	491.395.500,00	171.118.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>10.800.000.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>

**4.1.1. Pendapatan LRA**

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu unit pusat biaya (*cost center*) dalam Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pusat biaya (*cost center*) adalah unit dalam organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

#### 4.1.2. Belanja

Belanja daerah yang dialokasikan di Inspektorat Provinsi Daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 sebesar Rp 21.740.684.137,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 20.125.196.840,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>21.311.882.137,00</b>	<b>19.784.038.640,00</b>	<b>92,83</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	10.940.684.137,00	10.189.067.321,00	92,74
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.371.198.000,00	9.594.971.319,00	92,94
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>428.802.000,00</b>	<b>341.158.200,00</b>	<b>79,56</b>
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	407.350.000,00	341.158.200,00	83,75
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.452.000,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>21.740.684.137,00</b>	<b>20.125.196.840,00</b>	<b>92,57</b>

Realisasi Belanja tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.240.184.459,00 dibandingkan tahun anggaran 2017 disebabkan adanya kenaikan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Perbandingan realisasi belanja tahun anggaran 2018 dan 2017 disajikan pada tabel berikut ini:

Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/(Turun)	
	TA 2018	TA 2017	Rp	%
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>19.784.038.640,00</b>	<b>16.701.356.019,00</b>	<b>3.082.682.681,00</b>	<b>18,45</b>
Belanja Pegawai	10.189.067.321,00	8.917.192.539,00	1.271.874.782,00	14,26
Belanja Barang dan Jasa	9.594.971.319,00	7.784.163.480,00	1.810.807.839,00	23,26
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>341.158.200,00</b>	<b>183.656.362,00</b>	<b>157.501.838,00</b>	<b>85,76</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	341.158.200,00	183.656.362,00	157.501.838,00	85,76
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.125.196.840,00</b>	<b>16.885.012.381,00</b>	<b>3.240.184.459,00</b>	<b>19,19</b>

##### 4.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

### a. Belanja Pegawai

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut ini:

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	7.026.150.143,00	6.355.727.433,00	90,46
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.914.533.994,00	3.833.339.888,00	97,93
<b>Jumlah</b>	<b>10.940.684.137,00</b>	<b>10.189.067.321,00</b>	<b>93,13</b>

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 10.189.067.321,00 dan Rp 8.917.192.539,00. Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 1.271.874.782,00 atau 14,26 %, karena terdapat pembayaran TPP ke 13 dan 14 serta penambahan pegawai pada tahun yang berjalan. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 dan 2017 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2018	TA 2017	Rp	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	6.355.727.433,00	6.113.262.440,00	242.464.993,00	3,96
Belanja TPP	3.833.339.888,00	2.803.930.099,00	1.029.409.789,00	3,67
<b>Jumlah</b>	<b>10.189.067.321,00</b>	<b>8.917.192.539,00</b>	<b>1.271.874.782,00</b>	<b>14,26</b>

### b. Belanja Barang dan Jasa

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut ini:

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.371.198.000,00</b>	<b>9.594.971.319,00</b>	<b>23,26 %</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 9.594.971.319,00 dan Rp 7.784.163.480,00. Kenaikan Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.810.807.839,00 atau 23,26 %. Perbandingan Realisasi Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2018	TA 2017	Rp	%
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.594.971.319,00	7.784.163.480,00	1.810.807.839,00	24,00

#### 4.1.2.2. Belanja Modal

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut ini:

##### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2018

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	407.350.000,00	341.158.200,00	83,75
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.452.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>428. 802.000,00</b>	<b>341.158.200,00</b>	<b>79,56</b>

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 341.158.200,00 dan Rp 183.656.362,00. Kenaikan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 157.501.838,00 atau 85,75 %. Perbandingan Realisasi Modal Tahun 2018 dan 2017 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2018	TA 2017	Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	341.158.200,00	183.656.362,00	157.501.838,00	85,76
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>341.158.200,00</b>	<b>183.656.362,00</b>	<b>157.501.838,00</b>	<b>85,75</b>

Rincian Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Harga Per Unit	Jumlah (Rp.)
1	AC 1 PK Daikin 1 unit	4.025.000,00	4.025.000,00
2	Laptop HP 240 G6Core i7 5 unit	14.500.000,00	72.500.000,00
3	Printer Canon 5 unit	1.425.000,00	7.125.000,00
4	Scanner Canon Scan Lide 220 5 Unit	1.450.000,00	7.250.000,00
5	Alat Ukur Jarak Digital LaserKrisbow 3 unit	3.300.000,00	9.900.000,00
6	AlatUkurJalan Krisbow 3 unit	676.667,00	2.030.000,00
7	Mesin Penghancur Kertas Secure E2SC 10 A 3 unit	1.620.000,00	4.860.000,00
8	Rak Piring Krisbow 2 Unit	2.350.000,00	4.700.000,00
9	AC Split 1 PKSharp 5 unit	4.250.000,00	21.250.000,00
10	Kursi Staf Zolla 15 Unit	1.999.000,00	29.985.000,00
11	Meja Kerja Staff MC21212 15 Unit	1.149.000,00	17.235.000,00

12	Sound system		49.992.500,00
13	Sepeda Motor Honda New Vario 150 ESP	21.300.700,00	21.300.700,00
14	Komputer PC HP Pav 24-R012D 3 unit	17.395.000,00	52.185.000,00
15	Printer Canon Pixma MX 497 3 unit	1.300.000,00	3.900.000,00
16	Infokus Epson EB-980 W 2 unit	16.460.000,00	32.920.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>341.158.200,00</b>

## 4.2. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

### 4.2.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 1.901.443.292,37 dan Rp 2.137.796.317,41. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan pada tabel sebagai berikut:

#### Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017

Keterangan	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<b>Aset Lancar:</b>		
Persediaan	2.685.000,00	6.401.000,00
Biaya Dibayar Dimuka	-	37.739.917,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>44.140.917,00</b>

#### 4.2.1.1. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp 2.685.000,00 dan Rp 6.401.000,00. Persediaan merupakan jenis barang dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. dikarenakan terdapat penurunan nilai Persediaan sebesar Rp 3.716.000,00. Rincian persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	ATK	1.786.400,00	5.505.300,00
2	Barang Cetak	332.500,00	0,00
3	Alat Listrik	120.700,00	697.700,00
4	Alat Kebersihan	445.400,00	198.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>6.401.000,00</b>

#### 4.2.1.2. Biaya Dibayar Dimuka

Nilai Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 37.739.917,00, sedangkan per 31 Desember 2018 Biaya Dibayar Dimuka telah terealisasi seluruhnya. Biaya Dibayar Dimuka merupakan Biaya Asuransi Alat-Alat Angkutan pada tahun 2017 yang telah terealisasi pada tahun 2018.

#### 4.2.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 1.105.961.601,97 dan Rp 2.027.205.400,41. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan pada tabel sebagai berikut:

##### Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	6.361.111.357,92	6.748.329.848,30
2	Gedung dan Bangunan	2.724.698.552,00	2.724.698.552,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.970.000,00	19.970.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	23.815.909,00	23.815.909,00
	<b>Nilai Perolehan</b>	<b>9.129.595.818,92</b>	<b>9.516.814.309,30</b>
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(8.023.634.216,93)</b>	<b>(7.489.608.908,89)</b>
	<b>Nilai Buku</b>	<b>1.105.961.601,99</b>	<b>2.027.205.400,41</b>

#### 4.2.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 6.361.111.357,92 dan Rp 6.748.329.848,30. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin ke Aset lainnya sebesar Rp726.346.690,40. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp 8.023.634.216,93 sehingga nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	6.748.329.848,30
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	339.128.200,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	726.346.690,40
Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	6.361.111.357,90
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018	5.120.172.338,47
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>1.240.939.019,43</b>

#### 4.2.2.2. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 2.724.698.552,00 dan 2.724.698.552,00. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.171.124.188,06. sehingga nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp 553.574.363,94.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	2.724.698.552,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018	2.171.124.188,06
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>553.574.363,94</b>

#### 4.2.2.3. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 19.970.000,00 dan Rp19.970.000,00. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp 5.991.000,00 sehingga nilai buku Jalan, Jaringan dan Instalasi pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp 13.979.000,00.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	19.970.000,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018	5.991.000,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>13.979.000,00</b>

#### 4.2.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 23.815.909,00 dan Rp23.815.909,00. Aset Tetap Lainnya merupakan koleksi buku perpustakaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

#### 4.2.2.5. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 8.023.634.216,93 dan Rp 7.489.608.908,89. Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan dan Instalasi dan Aset lain-lain.

Uraian	Jumlah (Rp)
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017	7.489.608.908,89
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.120.172.338,47
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.171.124.188,06
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.991.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	726.346.690,40
<b>Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018</b>	<b>8.023.634.216,93</b>

#### 4.2.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 792.796.690,40 dan Rp 66.450.000,00. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin ke Aset lainnya sebesar Rp726.346.690,40. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp 726.346.690,40 sehingga nilai buku Aset Lainnya pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp 64.450.000. Aset Lainnya merupakan aset lain-lain yaitu aset dalam kondisi rusak berat.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	66.450.000,00
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	726.346.690,40
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018	726.346.690,40
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>64.450.000,00</b>

#### 4.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 15.127.527,00 dan Rp 17.878.293,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang belanja jasa kantor pada tanggal pelaporan.

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Belanja Air	758.400,00	615.700,00
2	Belanja Telepon	1.813.216,00	4.881.943,00
3	Belanja Listrik	12.156.111,00	12.010.850,00
4	Belanja TV Kabel	399.800,00	369.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.127.527,00</b>	<b>17.878.293,00</b>

#### 4.2.5. Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 1.886.315.765,37 dan Rp 2.119.918.024,41. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### 4.3. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

#### 4.3.1. Pendapatan-LO

Tidak terdapat Pendapatan-LO pada Laporan Operasional Inspektorat Daerah Provinsi Jambi karena sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

#### 4.3.2. Beban

Jumlah Beban tahun 2018 dan 2017 masing-masing Rp 20.319.149.882,04 dan Rp 17.308.242.700,47. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan operasional. Rincian Beban tahun 2018 dan 2017 disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	2018	2017	Jumlah	%
Beban Pegawai-LO	10.189.067.321,00	8.917.192.539,00	1.271.874.782,00	14,26
Beban Barang dan Jasa	9.633.676.470,00	7.785.940.388,00	1.847.736.082,00	23,73
Beban Penyusutan	534.025.308,04	605.109.773,47	(71.084.465,43)	(11,75)

#### 4.3.2.1. Beban Pegawai-LO

Jumlah Beban Pegawai-LO tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 10.189.067.321,00 dan Rp 8.917.192.539,00. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Rincian Beban Pegawai disajikan sebagai berikut:

### Rincian Beban Pegawai

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	2018	2017	Jumlah	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	6.355.727.433,00	6.113.262.440,00	242.464.993,00	3,96
Belanja TPP	3.833.339.888,00	2.803.930.099,00	1.029.409.789,00	3,67
<b>Jumlah</b>	<b>10.189.067.321,00</b>	<b>8.917.192.539,00</b>	<b>1.271.874.782,00</b>	<b>14,26</b>

#### 4.3.2.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 9.596.057.253,00 dan Rp 7.785.940.388,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut:

#### Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	2018	2017	Jumlah	%
Belanja Persediaan	860.469.040,00	679.761.831,00	180.707.209,00	26,58
Belanja Jasa	1.120.763.221,00	1.108.475.770,00	12.287.451,00	1,10
Belanja Pemeliharaan	463.127.510,00	363.511.702,00	99.615.808,00	27,40
Belanja Perjalanan Dinas	7.189.316.699,00	5.634.191.085,00	1.555.125.614,00	27,60
<b>Jumlah</b>	<b>9.633.676.470,00</b>	<b>7.785.940.388,00</b>	<b>1.847.736.082,00</b>	<b>23,73</b>

#### 4.3.2.3. Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 534.025.308,04 dan Rp 605.109.773,47. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan disajikan sebagai berikut:

#### Rincian Beban Penyusutan

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	2018	2017	Jumlah	%
Beban Penyusutan	534.025.308,04	605.109.773,47	71.084.465,43	(11,74)

### **4.3.3. Surplus/Defisit-LO**

Defisit tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 20.319.149.882,04 dan Rp 17.308.242.700,47. Jumlah per 31 Desember 2018 merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp 20.319.149.882,04.

## **4.4. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas**

### **4.4.1. Ekuitas Awal**

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 2.119.918.024,41 dan Rp. 2.511.241.867,88

### **4.4.2. Surplus/Defisit-LO**

Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp 20.356.769.099,04 dan Rp17.308.242.700,47. Jumlah per 31 Desember 2018 merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp 20.356.769.099,04, sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional.

### **4.4.3. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 1.886.315.765,37 dan Rp 2.119.918.024,41. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2018 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp1.901.443.292,37 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp 15.127.527,00.

## **BAB V PENUTUP**

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan handal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 secara keseluruhan.

Jambi, Maret 2019

**Inspektur,**



**Dr. H. Kailani, S.H., M.Hum.**

NIP. 19601023 198903 1 002